

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2015



DIREKTORAT JENDERAL  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
KEMENTERIAN KOMINFO

**LAPORAN KINERJA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2015**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2015**

**Pengarah:**

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

**Penanggung Jawab:**

Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

**Sekretaris:**

Sumiati

**Editor:**

Perdamen Sinuraya  
Widodo Hastjaryo  
Lukman Hakim

**Penulis:**

Sri Handiman S  
Prasetyo Hadi

**Grafis:**

Danang Firmansyah  
Harfizan Arnas  
Alfi Sahrin  
Supriyanto

**Diterbitkan oleh:**

**Bagian Penyusunan Progam & Pelaporan Setditjen Informasi dan Komunikasi Publik  
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI**

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	5
	A. Latar Belakang	5
	B. <i>Organisasi</i>	6
	C. Aspek Sinergis Organisasi dan Permasalahan Utama	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	12
	A. RPJMN 2015 – 2019	13
	B. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019	14
	C. Perjanjian Kinerja	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	21
	A. Standarisasi Penilaian	21
	B. Kinerja Eselon I Tahun 2015	23
	1. Capaian Kinerja	23
	2. Analisis Capaian Kinerja	29
	C. Kinerja Eselon II Tahun 2015	31
	1. Kinerja Direktorat Komunikasi Publik	31
	2. Kinerja Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi	35
	3. Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik	38
	4. Kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi	43
	5. Kinerja Direktorat Layanan Informasi Internasional	51
	6. Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal IKP	55
BAB IV	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60
	Lampiran Realisasi Keuangan 2015	62

### Daftar Tabel

Tabel 1.	Trisakti	5
Tabel 2.	Pengelompokan Tantangan Utama Pembangunan	9
Tabel 3.	Perbedaan Karakteristik Alur Penyampaian Informasi	10

Tabel 4.	Indikator Sasaran Strategis Pembangunan Kominfo 2015-2019	16
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja di Lingkup Kemenkominfo	17
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Ditjen IKP Berdasarkan RPJMN 2015-2109	17
Tabel 7.	Perjanjian Kinerja Dirjen IKP yang Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia	19
Tabel 8.	Standarisasi Penilaian Kinerja	21
Tabel 9.	Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMN 2015-2019	24
Tabel 10.	Perjanjian Kinerja yang Mendukung seluruh Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia	28
Tabel 11.	Klasifikasi Permasalahan Pengukuran	30
Tabel 11.	Capaian Kinerja Direktorat Komunikasi Publik	32
Tabel 12.	Capaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi	35
Tabel 13.	Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik	38
Tabel 14.	Capaian Kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi	43
Tabel 15.	Capaian Kinerja Direktorat Layanan Informasi Internasional	51
Tabel 16.	Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal IKP	55

#### **Daftar Diagram**

Diagram 1.	Organisasi Kemenkominfo	7
Diagram 2.	Organisasi Ditjen IKP	8
Diagram 3.	Arah Pembangunan dan Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2015	12
Diagram 4.	Program Utama Kemenkominfo Berdasarkan Nawacita dan Agenda Pembangunan Nasional	16
Diagram 5.	Korelasi Pengukuran Capaian IKU dan IKK di Lingkup Ditjen IKP	59

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Cita-cita NKRI adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sedangkan tujuannya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam rangka mengisi kemerdekaan yang telah diraih sejak 17 Agustus 1945, tugas pokok bangsa Indonesia adalah melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan. Salah satu cara mengisi kemerdekaan adalah melaksanakan pembangunan komunikasi dan informatika di wilayah NKRI.

Demi mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia perlu memiliki daya tahan terhadap berbagai deraan gelombang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu memiliki ideologi yang merupakan penuntun; penggerak; pemersatu perjuangan, dan pengarah dalam mewujudkan cita-cita nasional. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Prinsip Trisakti yakni berdaulat dalam politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

**Tabel 1. Trisakti**

<b>No.</b>	<b>Trisakti</b>	<b>Rincian</b>
1.	Berdaulat dalam politik	Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong-royong dan persatuan bangsa
2.	Berdikari secara ekonomi	Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
3.	Berkepribadian dalam kebudayaan	Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Prinsip dasar Trisakti menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan kepada mandat konstitusi, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika. Trisakti merupakan pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

Pembangunan informasi dan komunikasi menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan di ruang publik di tengah dinamika politik, kondisi geografis berupa kepulauan, perubahan sosial budaya yang belum merata, serta pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perkembangan TIK merupakan pemicu dan pemacu perubahan cara mengelola informasi dan komunikasi di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. TIK memainkan peran penting dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan memungkinkan membuat, mengelola, dan berbagi pengetahuan.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen IKP Kemenkominfo) bertekad untuk (1) memberikan layanan informasi yang mengedukasi, memberdayakan, dan mencerahkan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan (2) menjamin terselenggaranya komunikasi publik yang lancar dan demokratis.

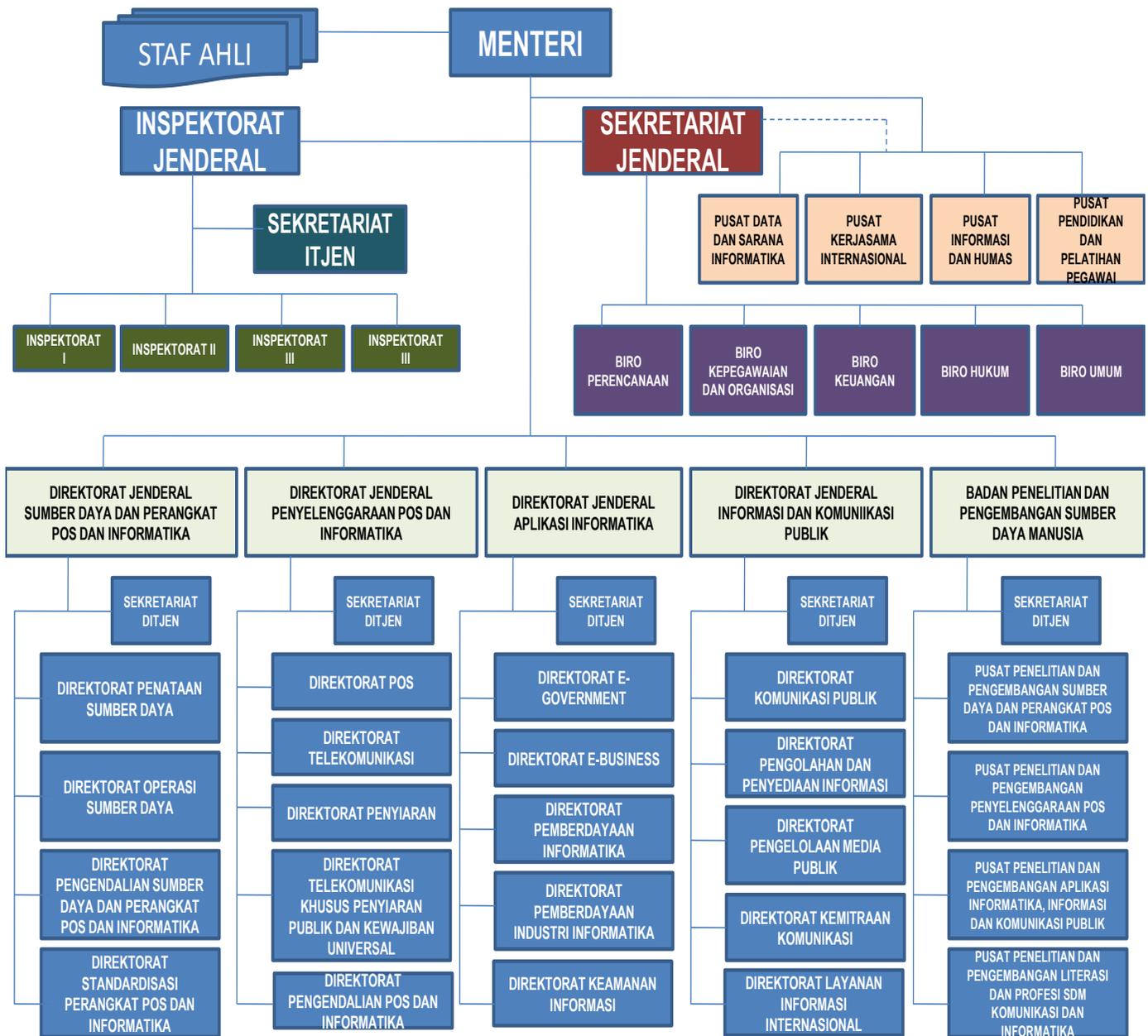
Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen IKP. Kinerja pemerintah yang akuntabel merupakan wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **B. Organisasi**

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara itu, fungsi Kemenkominfo adalah:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

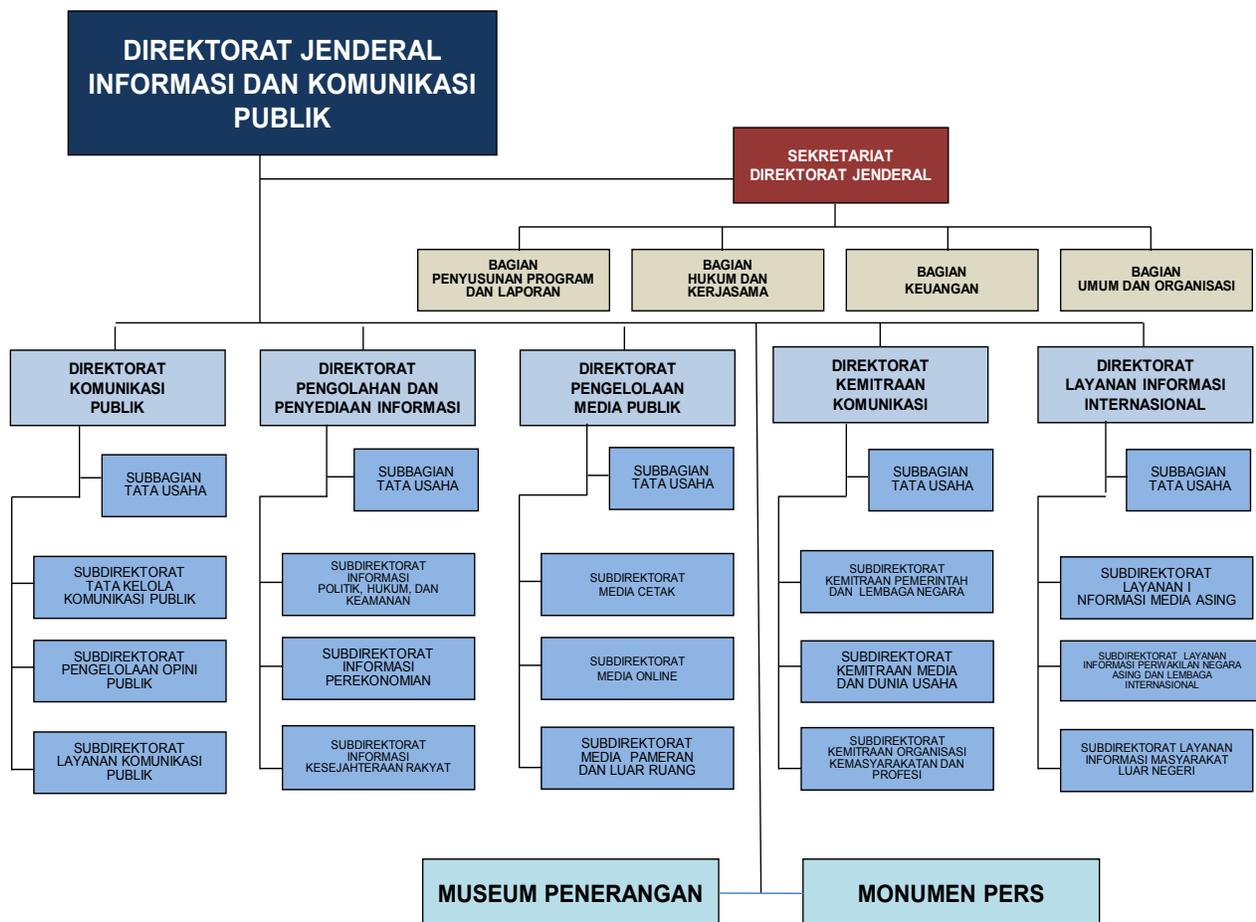
**Diagram 1. Organisasi Kemenkominfo**



Ditjen IKP sebagai salah satu unit kerja di lingkup Kemenkominfo memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan seluruh kebijakan dan standarisasi teknis di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah. Sementara itu, fungsi Ditjen IKP adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

**Diagram 2. Organisasi Ditjen IKP**



### C. Aspek Sinergis Organisasi dan Permasalahan Utama

Bangsa Indonesia dihadapkan kepada tiga masalah pokok dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Permasalahan pokok tersebut mencakup berbagai kendala dalam pembangunan komunikasi dan informatika tanah air.

**Tabel 2. Pengelompokan Tantangan Utama Pembangunan**

No.	Upaya	Tantangan Utama	Tantangan di bidang Komunikasi dan Informatika
1.	Dalam rangka meningkatkan wibawa negara	Tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi <i>Government Public Relations</i> (GPR) belum berjalan optimal</li> <li>b. Sebagian besar Badan Publik belum mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>c. Pemberitaan media massa kurang berimbang yang cenderung menyudutkan pemerintah</li> <li>d. Pelaksanaan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) Bidang Pers belum terukur (saat ini dipercayakan kepada Perum LKBN Antara)</li> <li>e. Masih berkembangnya budaya korupsi ditandai dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di urutan 117 dari 175 negara pada tahun 2015<sup>1</sup></li> </ul>
2.	Dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa	Tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan	Masyarakat di daerah terluar, terdepan, dan terpencil belum mampu memanfaatkan Layanan Informasi dan Komunikasi yang mendidik ( <i>educative</i> ), mencerahkan ( <i>enlightening</i> ), dan memberdayakan ( <i>empowering</i> ) masyarakat dalam Kerangka NKRI ( <i>nationalism</i> )

<sup>1</sup>Corruption Perceptions Index 2014: <https://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014>

3.	Dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi	Tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum berperan dan berfungsinya Pejabat Fungsional Pranata Humas</li> <li>b. Situasi politik yang “memanas” menjelang pelaksanaan Pemillukada Serentak akhir 2015</li> </ul>
----	---	---	--

Disamping itu dalam menghadapi tantangan di bidang komunikasi dan informatika, ada kondisi obyektif yang kurang menguntungkan yakni:

1. Kebijakan Otonomi Daerah di era Reformasi membawa dampak ”terputusnya” komunikasi antara pusat dengan daerah
2. Akses masyarakat terhadap informasi publik belum merata sehingga menghambat pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah.

Kebijakan Otonomi Daerah (desentralisasi) setelah kehadiran Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan terputusnya komunikasi antara pusat dan daerah dibanding masa Orde Baru yang sentralistik. Karakteristik alur penyampaian informasi setelah era reformasi berubah drastis dibanding era Orde Baru.

**Tabel 3. Perbedaan Karakteristik Alur Penyampaian Informasi**

	<b>Era Orde Baru yang Sentralistik</b>	<b>Era Reformasi yang Desentralistik</b>
<b>Karakteristik Penyampaian Informasi Kebijakan Pemerintah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Departemen Penerangan (Deppen) merupakan <i>leading sector</i> penyampaian informasi</li> <li>2. Deppen sebagai Juru Bicara Pemerintah</li> <li>3. Menteri Penerangan memberikan keterangan pers sesuai Sidang Kabinet</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berwenang sebagai sumber informasi</li> <li>2. Kemenkominfo bermitra dengan kementerian lain dalam penyampaian informasi</li> <li>3. Menkominfo memfasilitasi penyampaian informasi</li> </ol>
<b>Karakteristik Media Komunikasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RRI dan TVRI menjadi media pemerintah</li> <li>2. Siaran sentral mudah</li> <li>3. RRI dan TVRI mudah untuk meminta radio dan TV swasta untuk <i>relay</i> siaran</li> <li>4. Nuansa pembinaan terhadap keberadaan media</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RRI dan TVRI independen dalam pelaksanaan siaran</li> <li>2. Kemenkominfo menjadi fasilitator siaran kebijakan pemerintah</li> <li>3. Kemenkominfo menyediakan dana untuk siaran</li> <li>4. Nuansa pemberdayaan dan bermitra dengan media</li> </ol>

Untuk menjawab tantangan tersebut, pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia harus merupakan gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya layanan komunikasi dan informatika di semua daerah, termasuk di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Dengan demikian pembangunan komunikasi dan informatika oleh Ditjen IKP secara garis besar ditujukan untuk:

1. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
3. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing; dan
4. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik.

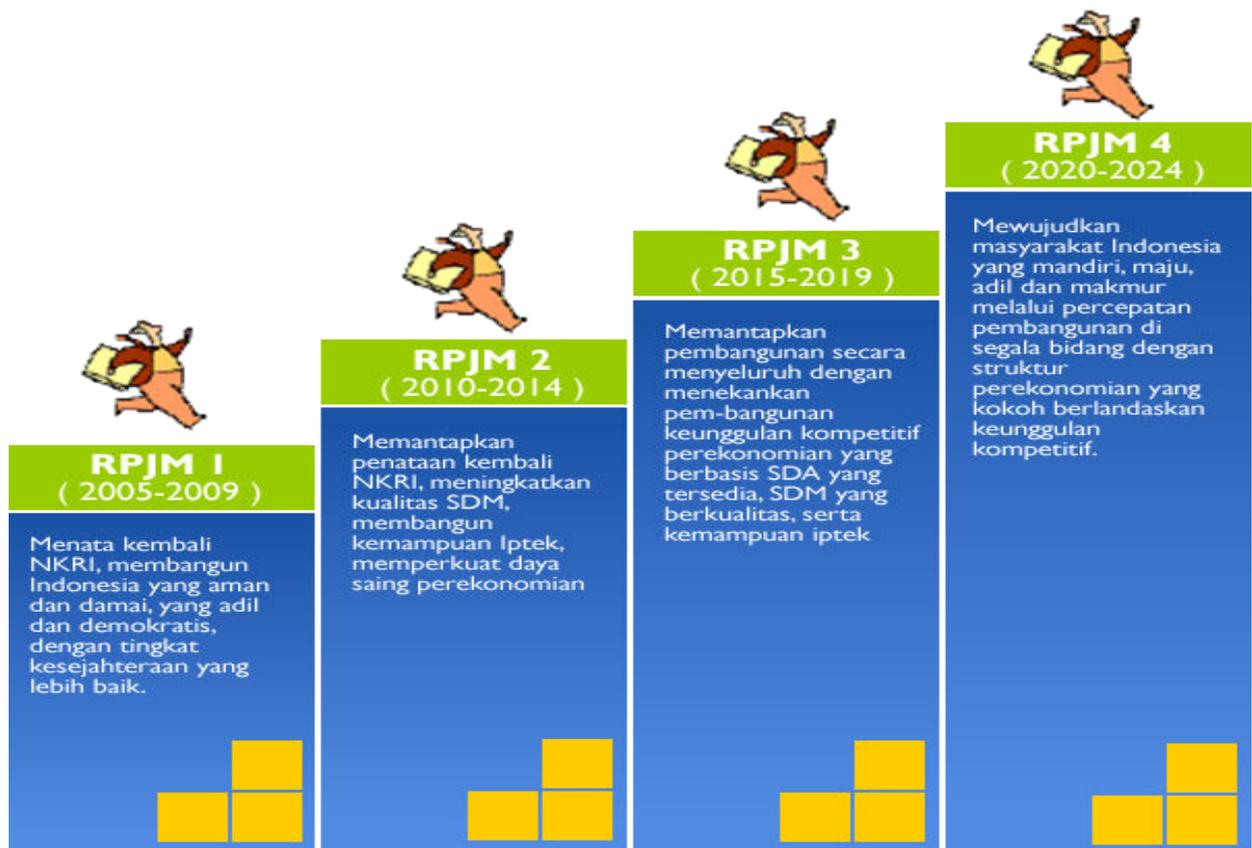
## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Sistem perencanaan yang baik akan mendorong keberhasilan pemerintah mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan dapat bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan sebagaimana gambar dibawah ini:

**Diagram 3. Arah Pembangunan dan Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2015**



Sebagai pengejawantahan RPJPN 2005-2025, Ditjen IKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien, dan akuntabel berpedoman kepada dokumen perencanaan, baik yang bersifat jangka menengah maupun jangka pendek, yang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
2. Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo Tahun 2015-2019
3. Penetapan Kinerja Ditjen IKP Tahun 2015

#### **A. RPJMN 2015-2019**

Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2015, RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. Penyusunan RPJMN 2015-2019 sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan Konstitusi UUD 1945 dan RPJPN 2005–2025.

Pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan kepada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Berkaitan dengan ini telah diterapkan Visi **Pembangunan Nasional untuk Tahun 2015-2019** adalah: **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui **7 Misi Pembangunan** yakni:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas. Kesembilan Agenda Prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

## **B. Rencana Strategis Tahun 2015-2019**

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman kepada RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Renstra Kemenkominfo Tahun 2015-2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika dalam periode 2015-2019 diprioritaskan kepada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam mendukung pencapaian Agenda Prioritas RPJMN 2015-2019, Kemenkominfo menggulirkan koridor penyusunan program kerja terpilih untuk Renstra 2015-2019. Koridor penyusunan Renstra 2015-2019 dibatasi oleh janji Trisakti dan Nawa Cita.

**Visi Kemenkominfo** untuk tahun 2015-2019, mengacu kepada visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yakni **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Visi digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kemenkominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemenkominfo diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK

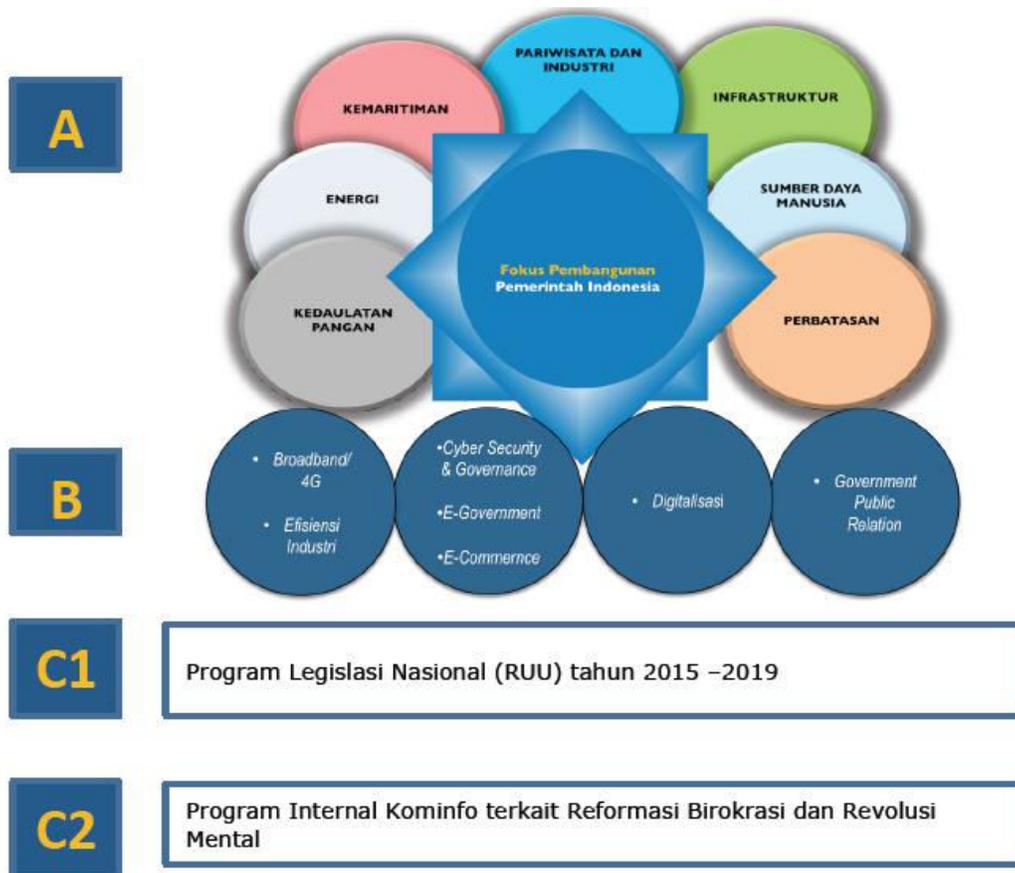
Sementara itu, **tujuan Kemenkominfo** antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Adapun **Sasaran Strategis Pembangunan Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019** disusun dengan 4 fokus utama yakni:

1. Kemenkominfo sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan
2. Kemenkominfo sebagai *leading sector* di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran
3. Kemenkominfo sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran
4. Kemenkominfo sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

**Diagram 4. Program Utama Kemenkominfo  
Berdasarkan Nawacita dan Agenda Pembangunan Nasional**



Dalam rangka mendorong pencapaian Sasaran Strategis Kemenkominfo 2015-2019, Ditjen IKP telah menyusun beberapa indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Indikator Sasaran Strategis Pembangunan Kominfo 2015-2019**

No.	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik	Persentase (%) Konten Informasi yang Diterima Pemda
		Jumlah Lembaga Sosial yang Menerima Konten Informasi
		Persentase (%) masyarakat daerah yang melek informasi
		Jumlah Regulasi dasar untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik
		Persentase (%) Kerjasama dan Kemitraan yang efektif dalam rangka penyebaran informasi publik
		Persentase (%) SDM Pranata Humas yang bersertifikasi/sesuai standar

### C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Rencana Kerja di lingkup Kemenkominfo merujuk kepada RPJMN 2015-2019 dan perintah (direktif) Presiden RI yang mendukung seluruh fokus pembangunan Pemerintah Indonesia. Kedua rujukan tersebut di lingkup Kemenkominfo diterjemahkan ke dalam Renstra Kemenkominfo Tahun 2015-2019. Di level Unit Kerja Eselon I, Rencana Kerja dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja RPJMN 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktif Menkominfo yang mendukung seluruh fokus pembangunan Pemerintah Indonesia.

**Tabel 5. Perjanjian Kinerja di Lingkup Kemenkominfo**

No.	Perjanjian Kinerja Eselon I	Perjanjian Kinerja Eselon II
1.	Mendorong pencapaian RPJMN sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019	Mendukung secara sinergi seluruh pencapaian Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon I
2.	Mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia	

Ditjen IKP sebagai salah satu unit kerja di lingkup Kemenkominfo memiliki beragam target yang perlu dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Ditjen IKP berdasarkan RPJMN 2015-2019.

**Tabel 6. Perjanjian Kinerja Ditjen IKP Berdasarkan RPJMN 2015-2109**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik	1. Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi public	60%
		2. Jumlah Lembaga Sosial yang menerima konten informasi	100
		3. Persentase (%) tingkat pertumbuhan industri konten berbasis edukasi	15%
		4. Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar Informasi	20%
		5. Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik	6

2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	1. Persentase (%) akses masyarakat terhadap media publik	70%
		2. Jumlah kerjasama dan kemitraan yang efektif dalam rangka penyebaran informasi publik di dalam dan luar negeri	52
		3. Persentase (%) SDM Pranata Humas yang bersertifikasi/sesuai standar	20%
3.	Meningkatnya Partisipasi publik dan citra positif pemerintah	1. Indeks Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Pemerintah	50%
		2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik oleh K/L/D	35%
		3. Jumlah regulasi terkait implementasi GPR	5
4.	Terbangunnya proyek percontohan dalam rangka kampanye revolusi mental	1. Jumlah regulasi terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental	2
		2. Persentase (%) penyampaian pesan Kampanye Nasional Revolusi Mental kepada masyarakat di 1200 kecamatan	90%
		3. Jumlah lembaga penyiaran publik yang menyediakan slot untuk tayangan Kampanye Nasional Revolusi Mental	76

Selain itu, Unit Kerja di lingkup Kemenkominfo juga terikat Perjanjian Kinerja yang mendukung fokus pembangunan Pemerintah Indonesia. Ditjen IKP memiliki beragam target yang perlu dicapai sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 7. Perjanjian Kinerja Dirjen IKP yang Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggungjawab	Target
1.	Konektifitas broadband National - Kedaulatan Pangan - Kedaulatan Energi - Kemaritiman - Pariwisata & Industri - Infrastruktur - Perbatasan	- Keterbukaan Informasi publik - Negara hadir dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	SDPPI, PPI, APTIKA & IKP	- Desain TIK environment sebagai model acuan - Peraturan untuk mendorong operator memusatkan pengembangan bisnisnya ke lokasi prioritas (lokpri) sektor unggulan sesuai model acuan desain TIK - Implementasi desain TIK
2.	Perluasan aksesibilitas broadband menggunakan anggaran USO (redesain USO)	- Mengatasi digital divide di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil - Tersedianya sistem desa broadband terpadu untuk rakyat sesuai nawa cita	PPI didukung oleh SDPPI, APTIKA & IKP	- Menyusun bisnis model Redesain USO - Permen tentang Redesain USO - Penyelenggaraan 3 desa pilot sistem desa broadband terpadu di desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman sesuai 50 lokpri BNPP - Terbangunnya sistem desa broadband terpadu (desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman) di 50 lokpri BNPP
3.	Government Public Relation	Penyusunan Strakom, produksi konten diseminasi berdasarkan Fokus pembangunan Indonesia di Lembaga Penyiaran	IKP	- Peta Jejaring Komunikasi - Terbentuknya 30 lembaga jejaring komunikasi - Ditetapkannya 3 regulasi tentang GPR - Tersedianya 24 tema materi informasi kebijakan publik - Pelaksanaan pilot project GPR oleh 7 K/L/D

4.	Diseminasi Informasi ke seluruh pelosok Indonesia terkait Revolusi Mental	Sosialisasi konten informasi strategis berdasarkan Fokus Pembangunan Indonesia di 1.200 Kecamatan	IKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta stakeholder sasaran diseminasi informasi</li> <li>- Strategi Komunikasi diseminasi Informasi terkait revolusi mental</li> <li>- MOU dengan 35 lembaga dalam rangka diseminasi informasi revolusi mental</li> <li>- Diseminasi informasi revolusi mental kepada K/L/D, ormas, dan media</li> </ul>
----	---	---	-----	---

**Keterangan**

- USO : Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Universal
- SDPPI : Sumber Daya dan Perangkat Pos dan informatika
- PPI : Penyelenggaraan Pos dan Informatika
- Aptika : Aplikasi Informatika
- BNPP : Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- K/L/D : Kementerian/Lembaga/Daerah

Dalam Perjanjian Kinerja yang mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah RI tersebut, Ditjen IKP pada tahun 2015 tidak ikut serta untuk memenuhi target dari sasaran strategis berikut: (1) Konektifitas broadband National Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Kemaritiman, Pariwisata & Industri, Infrastruktur dan Perbatasan dan (2) Perluasan aksesibilitas broadband menggunakan anggaran USO (redisain USO).

Ketidakikutsertaan Ditjen IKP dalam hal itu karena tidak adanya target yang selaras dengan tugas dan fungsi Ditjen IKP. Namun seiring Program Kerja yang mendukung seluruh fokus pembangunan Pemerintah Indonesia dirancang untuk periode 2015-2019, Ditjen IKP dapat saja ikut serta untuk memenuhi target dari kedua sasaran strategis tersebut di tahun-tahun berikutnya sepanjang target tersebut dicantumkan dalam program kerja dan selaras dengan tugas dan fungsi Ditjen IKP.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan upaya mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi yang memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kinerja pemerintah yang akuntabel pada gilirannya akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaporan Kinerja pada hakikatnya perlu selaras dengan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis. Oleh karena itu, realisasi kinerja dari suatu instansi seyogianya selaras dengan target yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga.

### A. Standarisasi Penilaian

Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkominfo memiliki standard pembobotan yang menjadi rujukan penilaian capaian kinerja di lingkup Kemenkominfo. Penilaian capaian kinerja Ditjen IKP yang merupakan salah satu unit kerja di lingkup Kemenkominfo merujuk kepada standard pembobotan yang dikeluarkan Biro Perencanaan tersebut. Dengan demikian, penilaian Kinerja Ditjen IKP sesuai standard penilaian Laporan Kinerja di lingkup Kemenkominfo.

**Tabel 8. Standarisasi Penilaian Kinerja**

	<b>Tahapan Kegiatan</b>	<b>Bobot Penilaian</b>
1.	<b>Penyusunan Peraturan/Regulasi (UU, PP, Perpres)</b>	
	a. Pengumpulan dan penyusunan bahan peraturan/regulasi	15%
	b. Penyusunan draf awal peraturan/regulasi	30%
	c. Legal drafting draf peraturan /regulasi pada Bagian Hukum	50%
	d. Legal drafting draf final peraturan/regulasi pada Biro Hukum	70%
	e. Persetujuan uji publik draf final peraturan/regulasi oleh Menteri	80%
	f. Uji Publik	90%
	g. Harmonisasi peraturan/regulasi	100%
2.	<b>Penyusunan Peraturan/Regulasi Kementerian (Permen/Kepmen)</b>	
	a. Pengumpulan dan penyusunan bahan peraturan/regulasi	15%
	b. Penyusunan draf awal peraturan/regulasi	30%
	c. Legal drafting draf peraturan/regulasi pada Bagian Hukum	50%
	d. Legal drafting draf final peraturan/pada Biro Hukum	70%
	e. Persetujuan uji publik draf final peraturan /regulasi oleh Menteri	80%
	f. Uji publik	90%
	g. Penetapan peraturan/regulasi oleh Menteri	100%
3.	<b>Sosialisasi dan Bimbingan Teknis</b>	
	a. Pengumpulan bahan dan pembuatan materi sosialisasi/ bimtek	30%

	b. Pelaksanaan sosialisasi/bimtek	75%
	c. Evaluasi pelaksanaan sosialisasi/bimtek	100%
<b>4.</b>	<b>Penyusunan Laporan (Laptah, Lakip, Laporan Keuangan dll)</b>	
	a. Pengumpulan dan penyusunan bahan	20%
	b. Penyusunan draf awal laporan	50%
	c. Penyusunan draf final laporan	70%
	d. Finalisasi laporan	95%
	e. Distribusi laporan	100%
<b>5.</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renja, Rencana Kerja Tahunan, dll)</b>	
	a. Pengumpulan dan penyusunan bahan	10%
	b. Penyusunan dokumen perencanaan pagu indikatif	30%
	c. Penyusunan dokumen perencanaan pagu sementara	50%
	d. Penyusunan dokumen perencanaan pagu definitif	75%
	e. Penetapan DIPA	100%
<b>6.</b>	<b>Pengadaan Jasa oleh Pihak Ke-3</b>	
	a. Pengumuman lelang	10%
	b. Penetapan pemenang lelang	30%
	c. Laporan pendahuluan	50%
	d. Laporan kemajuan	75%
	e. Laporan akhir	100%
<b>7.</b>	<b>Pengadaan Barang Umum oleh Pihak Ke-3</b>	
	a. Pengumuman lelang	10%
	b. Penetapan pemenang lelang	30%
	c. Pelaksanaan pekerjaan	50%
	d. Serah terima ke Tim Penerima Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	75%
	e. Pencatatan Barang Milik Negara (BMN)	100%
<b>8.</b>	<b>Pengadaan Barang Bersifat Konstruksi Bangunan oleh Pihak Ke-3</b>	
	a. Pengumuman lelang	10%
	b. Penetapan pemenang lelang	30%
	c. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi pondasi	50%
	d. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sipil dan mekanikal dan elektrikal (ME)	75%
	e. Pelaksanaan pekerjaan finishing	90%
	f. Serah terima ke Tim Penerima Barang, PPK dan KPA serta Pencatatan BMN	100%
<b>9.</b>	<b>Pengadaan Barang Bersifat Konstruksi IT oleh Pihak Ke-3</b>	
	a. Pengumuman lelang	10%
	b. Penetapan pemenang lelang	30%
	c. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang	50%
	d. Pelaksanaan pekerjaan instalasi	75%
	e. Pelaksanaan pekerjaan <i>commissioning test</i>	90%
	f. Serah terima ke Tim Penerima Barang, PPK dan KPA serta Pencatatan BMN	100%

<b>10.</b>	<b>Penelitian</b>	
	a. Persiapan teknis (pengajuan proposal, evaluasi proposal, penetapan proposal, seminar proposal)	10%
	b. Penyusunan desain penelitian	25%
	c. Penyusunan laporan sementara (pengumpulan data, pengolahan data, analisis data)	75%
	d. Penulisan laporan penelitian (laporan akhir)	100%

Sumber: Biro Perencanaan Setjen Kemenkominfo, 2015

Berdasarkan tabel tersebut, penilaian capaian kinerja di lingkup Kemenkominfo merujuk kepada tahapan proses yang telah dilakukan. Namun dalam praktiknya, ada beberapa hal berkaitan dengan pencapaian target yang perlu diperhatikan:

1. Suatu tahapan proses sudah berhasil dilalui, tetapi targetnya tidak tercapai: Untuk hal semacam itu, penilaiannya yakni pertama-tama merujuk terhadap tahapan proses yang telah dilalui dan seterusnya mengukur persentase pencapaian targetnya. Sebagai contoh, suatu Satuan Kerja melaksanakan kegiatan sosialisasi/bimtek dengan target peserta 100 orang, tetapi ternyata jumlah pesertanya hanya mencapai 50 orang sehingga perhitungannya sebagai berikut:  
Bobot tahapan pelaksanaan sosialisasi/bimtek (kode 3b) dengan peserta 100 orang adalah 75%, tetapi dalam kenyataannya hanya dihadiri 50 peserta, maka nilainya adalah  $0,5 \times 75\% = 37,5\%$
2. Jumlah target sudah tercapai, tetapi ada pencapaian lain sehingga total realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan: Untuk hal semacam itu, penilaiannya merujuk kepada pencapaian target yang telah ditetapkan di awal dengan nilai maksimalnya tetap 100%. Walau demikian, pencapaian lainnya tersebut dapat tetap dicantumkan dalam Laporan Kinerja. Sebagai contoh, suatu Satuan Kerja telah menyusun 3 regulasi atau 100% dari total target 3 regulasi kementerian yang telah ditetapkan, tetapi dalam praktiknya ada regulasi lain yang tengah disusun dan belum mencapai 100%, maka perhitungannya sebagai berikut:  
Pencapaian kinerja tetap mendapat nilai 100% karena pada prinsipnya target yang ditetapkan telah dicapai seluruhnya.

## **B. Kinerja Eselon I Tahun 2015**

### **1. Capaian Kinerja**

Pengukuran Kinerja Ditjen IKP merujuk kepada Perjanjian Kinerja Dirjen IKP yang terdiri dari Perjanjian Kinerja RPJMN 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktif Menkominfo yang mendukung seluruh fokus pembangunan Pemerintah Indonesia.

**Tabel 9. Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMN 2015-2019**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Uraian Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Bobot Capaian</b>	<b>Keterangan</b>
Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi public	60%	319 atau 60% pemda menyebarkan narasi tunggal melalui websitenya	88 pemda atau 16,57% dari 531 pemda menyebarkan narasi tunggal	27,62%	- Tahapan 4e (bobot 100%). tetapi target distribusi oleh pemda tidak tercapai - Perhitungannya adalah $16,57\% / 60\% \times 100\%$ -
Jumlah Lembaga Sosial yang Menerima Konten Informasi	100	100 lembaga sosial	100 lembaga sosial (realisasi 100%)	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)
Persentase (%) tingkat pertumbuhan industri konten berbasis edukasi	15%	Belum ada kesepakatan di lingkup Ditjen IKP mengenai batasannya.	-	0%	Kementerian PPN/Bappenas berpandangan bahwa Ditjen IKP dapat melakukan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan industri konten berbasis edukasi dengan merujuk hasil pemerinkatan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lembaga penyiaran
Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar Informasi	20%	20% masyarakat daerah sadar informasi	Pencapaian berdasarkan media mitra (radio komunitas) media elektronik (TV dan radio) media cetak forum dialog dan media baru	0%	Pengukuran tidak mewakili masyarakat daerah yang sadar informasi

Jumlah Regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik	6	6 regulasi atau 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draf Strakom Kedaulatan Pangan</li> <li>- Draf Strakom Untuk Antisipasi Krisis Komunikasi Kebijakan Sektor Energi dan Kelistrikan</li> <li>- Draf Strakom Sinergitas Antar Pihak Untuk Mendukung Kebijakan Maritim di Kawasan Nelayan dan Pesisir</li> <li>- Draft Strakom PBAK di Ruang Publik sudah disusun</li> <li>- Draft Grand Desain Komunikasi Pemerintahan untuk Sinergi di Kawasan Perbatasan sudah disusun</li> <li>- Draf Dokumen Pedoman Tata Kerja GPR</li> </ul>	0%	Tahapan 4c (bobot 70%), tetapi strakom dan pedoman bukan merupakan regulasi sehingga bobot 0%
Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik	70%	138 atau 70% dari total media center berkontribusi dengan mengirim berita lokal	Sebanyak 110 atau 56,12% dari total 196 media center berkontribusi aktif dalam penyebaran informasi dan mengirim berita lokal untuk infopublik	80,17%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan 4e (bobot 100%), tetapi target tidak tercapai</li> <li>- Perhitungannya adalah <math>56,12\% / 70\% \times 100\%</math></li> </ul>

Jumlah Kerjasama dan Kemitraan yang efektif dalam rangka penyebaran informasi publik di dalam dan luar negeri	52	52 kemitraan (100%)	43 atau 82,69% dari total 52 target kemitraan	82,69%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan 3c (bobot 100%) seiring belum melakukan evaluasi</li> <li>- Target tidak tercapai</li> <li>- Perhitungannya adalah <math>82,69\% / 100\% \times 100\%</math></li> </ul>
Persentase (%) SDM Pranata Humas yang bersertifikasi/sesuai standar	20%	215 atau 20% dari 1074 Pranata Humas bersertifikat/sesuai standar	<b>205</b> atau 19,09% sesuai standar, tetapi belum bersertifikat	95,45%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan 3c (bobot 100%)</li> <li>- Tidak diterbitkan sertifikat bagi peserta</li> <li>- Perhitungannya adalah <math>19,09\% / 20\% \times 100\%</math></li> </ul>
Indeks Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Pemerintah	50%	Tingkat kepercayaan publik terhadap kabinet kerja mencapai 50%	37%	74%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data merujuk hasil survei Indo Barometer, 2015</li> <li>- <math>37\% / 50\% \times 100\%</math></li> </ul>
Indeks Keterbukaan Informasi Publik oleh K/L/D	35%	Belum ada kesepakatan karena target persentase sedangkan realisasi adalah jumlah draf	1 berupa draf	0%	Realisasi berupa 1 draf tidak mencerminkan target persentase
Jumlah Regulasi terkait implementasi GPR	5	5 regulasi atau 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik</li> <li>- RPM Tata Kelola Kehumasan</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan 1g (bobot 100%)</li> <li>- Tahapan 2d (bobot 70%)</li> </ul>

			- RPM tentang Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik		- Tahapan 2d (bobot 70%)  - Perhitungannya adalah $(1 \times 100 + 2 \times 70\%) / 3$
Jumlah Regulasi terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental	2	2 regulasi (100%)	- Draf Keppres yang mewajibkan lembaga penyiaran untuk menyediakan durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial melalui PSA telah disusun, tetapi ditolak Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia - Strakom kampanye Revolusi Mental telah disusun	15%	- Tahapan 1d (bobot 30%)  - Strakom bukan merupakan regulasi sehingga bobot 0%  - Perhitungannya adalah $(30\% + 0\%) / 2$
Persentase (%) penyampaian pesan Kampanye Nasional Revolusi Mental kepada masyarakat di 1200 kecamatan	90%	1080 atau 90% dari 1200 kecamatan dikirim pesan	Telah dikirim Tabloid Komunika Edisi Revolusi Mental ke 1200 kecamatan	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)
Jumlah lembaga penyiaran publik yang menyediakan slot untuk tayangan Kampanye	76	76 (100%) lembaga penyiaran publik menyediakan slot	-	0%	Tahapan 1b (bobot 30%), tetapi Draf Keppres mendapat penolakan dari

Nasional Revolusi Mental					Lembaga Penyiaran
--------------------------	--	--	--	--	-------------------

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 12 atau 85,71% dari total 14 indikator Perjanjian Kinerja 2015 Eselon I Ditjen IKP berdasarkan RPJMN 2015-2019 tidak mencapai bobot 100%. Dari total 14 indikator tersebut, hanya 2 indikator atau 14,29% yang mencapai bobot 100%.

**Tabel 10. Perjanjian Kinerja yang Mendukung seluruh Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia**

Indikator Kinerja	Target	Uraian Target	Realisasi	Bobot Capaian	Keterangan
Government Public Relation	5 item	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Jejaring Komunikasi</li> <li>- Terbentuknya 30 lembaga jejaring komunikasi</li> <li>- Ditetapkannya 3 regulasi tentang GPR</li> <li>- Tersedianya 24 tema materi informasi kebijakan publik</li> <li>- Pelaksanaan pilot project GPR oleh 7 K/L/D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 peta</li> <li>30 lembaga</li> <li>3 regulasi (1 sudah terbit, 2 dalam proses)</li> <li>&gt;24 tema</li> <li>&gt;7 K/L/D</li> </ul>	97%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan 4e (bobot 100%)</li> <li>- Tahapan 3c (bobot 100%)</li> <li>- 1 regulasi tahapan 1g (bobot 100%) dan 2 regulasi tahapan 2d (bobot 70%) sehingga rata-ratanya 85%</li> <li>- Tahapan 4e (bobot 100%)</li> <li>- Tahapan 3c (bobot 100%)</li> <li>- Perhitungannya adalah <math>(100\%+100\% + 85\%+100\%+100\%)/5</math></li> </ul>
Diseminasi Informasi ke seluruh pelosok Indonesia	4 item	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta stakeholder sasaran diseminasi informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 peta</li> </ul>	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan 4e (bobot 100%)</li> </ul>

terkait Revolusi Mental		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategi Komunikasi diseminasi Informasi terkait revolusi mental</li> <li>- MoU dengan 35 lembaga dalam rangka diseminasi informasi revolusi mental</li> <li>- Diseminasi informasi revolusi mental kepada K/L/D, ormas, dan media</li> <li>-</li> </ul>	<p>1 Strategi Komunikai</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>Diseminasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan 4e (bobot 100%)</li> <li>- MOU dengan 35 lembaga dalam rangka diseminasi informasi revolusi mental belum tercapai sehingga nilainya 0%</li> <li>- Tahapan 4e (bobot 100%)</li> <li>- Perhitungannya adalah <math>(100\% \times 3) / 4</math></li> </ul>
-------------------------------	--	---	--	--

Berdasarkan data tersebut, tidak ada satupun indikator yang dapat mencapai bobot 100% dari total 2 indikator Perjanjian Kinerja 2015 Eselon I Ditjen IKP yang mendukung seluruh fokus pembangunan Pemerintah Indonesia. Namun demikian, pencapaian target masing-masing indikator dapat dikatakan sudah mendekati target yakni 96% dan 75%.

## 2. Analisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Ditjen IKP tahun 2015 secara umum belum mencapai target 100%, Penyebabnya bukan semata-mata karena Ditjen IKP tidak mampu memenuhi target seluruhnya, tetapi juga karena ada penolakan, target dan realisasi tidak selaras, serta pengukurannya tidak mewakili masyarakat yang dituju.

Selain itu, pemahaman Ditjen IKP mengenai target dari beberapa indikator perlu dicapai kesepahaman dengan *stakeholders* lain, terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Hal itu untuk menghindari perbedaan pemahaman yang dapat menurunkan nilai pengukuran bagi Ditjen IKP.

**Tabel 11. Klasifikasi Permasalahan Pengukuran**

No.	Klasifikasi	Program/Kegiatan/Indikator Kinerja	Rujukan
<b>Klasifikasi Tidak Mencapai Target</b>			
1.	Ada sebagian kecil target yang belum tercapai	a. Government Public Relation: Rancangan regulasi belum dianggap sebagai regulasi	Fokus Pembangunan
		b. Diseminasi Informasi ke seluruh pelosok Indonesia terkait Revolusi Mental	Fokus Pembangunan
		c. Jumlah Regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik: Rancangan regulasi belum dianggap sebagai regulasi	RPJMN
		d. Kerjasama dan kemitraan yang efektif dalam rangka penyebaran informasi publik	RPJMN
		e. Persentase (%) SDM Pranata Humas yang bersertifikasi/sesuai standar: Batasan sesuai standar masih perlu diperjelas yakni harus bersertifikat atau tidak selalu harus bersertifikat.	RPJMN
2.	Adanya penolakan terhadap upaya Ditjen IKP dari <i>stakeholders</i> terkait sehingga belum dapat diimplementasikan	Lembaga Penyiaran yang menyediakan slot untuk tayangan Kampanye Revolusi Mental	RPJMN
3.	Pengukuran tidak mewakili masyarakat yang dituju	Masyarakat daerah yang sadar informasi	RPJMN
4.	Target memang belum tercapai	a. Pemda yang menyebarkan konten informasi publik	RPJMN
		b. Tingkat pertumbuhan industri konten berbasis edukasi: Belum ada kesepakatan mengenai batasannya	RPJMN

		c. Persentase % pemda yang menyebarkan konten informasi publik dengan persentase (%) akses masyarakat terhadap media publik	RPJMN
		d. Indeks Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Pemerintah	RPJMN
		f. Indeks Keterbukaan Informasi Publik oleh K/L/D	RPJMN
<b>Klasifikasi yang Masih Perlu Dicapai Kesepahaman</b>			
1.	Ditjen IKP menilai hasil berupa suatu Rancangan Peraturan seyogianya telah memenuhi target indikator karena penetapannya berada di luar kewenangan Ditjen IKP	a. Jumlah regulasi terkait implementasi GPR: RPM Tata Kelola Kehumasan dan RPM Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik	RPJMN dan Fokus Pembangunan
		b. Regulasi terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental : Draf Keppres yang mewajibkan Lembaga Penyiaran durasi kampanye Revolusi Mental dan Restorasi sosial melalui Public Service Announcement (PSA)	RPJMN
2.	Ditjen IKP menilai Penetapan indikator regulasi mencakup penyusunan dokumen Strategi Komunikasi	a. Regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik: Strategi Komunikasi dan Pedoman seyogianya dapat dimasukkan sebagai bagian regulasi	RPJMN
		b. Regulasi terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental : Strakom Kampanye Revolusi Mental	RPJMN

## C. Kinerja Eselon II Tahun 2015

### 1. Kinerja Direktorat Komunikasi Publik

Direktorat Komunikasi Publik berupaya untuk memenuhi seluruh target yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Namun, pencapaian target belum semuanya mencapai bobot 100% seiring dengan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi. Di sisi lain, jumlah kebijakan dan standarisasi bidang komunikasi dan informasi publik yang perlu disusun mencapai 12 kebijakan atau jauh melebihi target Perjanjian Kinerja sebanyak 3 kebijakan.

**Tabel 11. Capaian Kinerja Direktorat Komunikasi Publik**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Uraian Target Realisasi	Bobot Capaian	Keterangan
Terselenggaranya Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional	Jumlah kebijakan dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik	3 Kebijakan	- Peraturan Menkominfo No. 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	100%*	Tahapan 2g (bobot 100%)
			- Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat		
			- Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik		
			- Draf Permen Kominfo tentang Pedoman Teknis JFPH (menunggu <i>feedback</i> dari 4 menteri)		Tahapan 2e (bobot 80%)
			- Draf Revisi Permen Kominfo tentang Pedoman Penyusunan Formasi JFPH sudah disusun (harmonisasi di Biro Hukum) - Draft Permen Kominfo tentang Tata Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik (sudah di Biro Hukum untuk harmonisasi)		Tahapan 2d (bobot 70%)

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draf Strakom Kedaulatan Pangan</li> <li>- Draf Strakom Untuk Antisipasi Krisis Komunikasi Kebijakan Sektor Energi dan Kelistrikan</li> <li>- Draf Strakom Sinergitas Antar Pihak Untuk Mendukung Kebijakan Maritim di Kawasan Nelayan dan Pesisir</li> <li>- Draft Strakom PBAK di Ruang Publik sudah disusun</li> <li>- Draft Grand Desain Komunikasi Pemerintahan untuk Sinergi di Kawasan Perbatasan sudah disusun</li> <li>- Draf Dokumen Pedoman Tata Kerja GPR</li> </ul>		Tahapan 4c (bobot 70%), tetapi strakom dan pedoman bukan merupakan regulasi sehingga bobot 0%
Terselenggaranya Pembinaan SDM untuk Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Nasional	Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya	200 Orang	400 orang Pranata Humas telah meningkat kompetensi dan kualitasnya melalui Bimtek, Rakor Pembinaan, Workshop, dan Kongres JFPH	100%	Tahapan 3c (bobot 100%)
	Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP	250 Orang	250 orang Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah meningkatkan kemampuannya dalam implementasi UU KIP (melalui Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 2 kali serta Rakor FKPPID 3 kali)	100%	Tahapan 3c (bobot 100%)

			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimtek PPID=128 orang</li> <li>b. Bimtek PPID=49 orang</li> <li>c. Rakor FKPPID =40 orang</li> <li>d. Rakor FKPPID= 10 orang</li> <li>e. Rakor FKPPID=23 orang</li> </ul>		
Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pengambilan kebijakan	Jumlah SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tatakelolanya di bidang informasi dan komunikasi publik	102 SKPD	- Bimtek Penguatan Kelembagaan SKPD Bidang Kominfo Pasca Implementasi UU 23 Tahun 2014 sudah diikuti 102 SKPD (146 peserta) dari Kab/Kota	100 %	Tahapan 3c (bobot 100%)
	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU KIP	2000 Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialog interaktif (seminggu 2 x) periode April s.d Desember sebanyak 74 kali</li> <li>- Dialog interaktif di Televisi sebanyak 15 kali</li> <li>- Pameran Keterbukaan Informasi Publik di Museum Sejarah Jakarta dihadiri oleh 432 orang</li> <li>- Pertunjukan Rakyat Keterbukaan Informasi Publik di Museum Sejarah Jakarta disaksikan oleh 100 orang</li> </ul>	75%	Tahapan 3b (bobot 75%) Dialog interaktif melalui media penyiaran tidak bersifat tatap muka sehingga jumlah penerima manfaatnya belum teridentifikasi dengan pasti
Tersusunnya Keppres tentang kewajiban lembaga penyiaran untuk menyediakan	Kebijakan yang menghimbau Lembaga Penyiaran untuk menyediakan	1 Dokumen	Draft Keppres yang mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyediakan durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial melalui PSA	30%	Tahapan 1b (bobot 30%)

durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial melalui PSA	durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial melalui PSA		ditolak Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia (ATVSI) -		
--	--	--	--	--	--

\*Dihitung 100% karena target 3 kebijakan sudah tercapai

Permasalahan utama pencapaian kinerja di lingkup Direktorat Komunikasi Publik adalah (1) berbagai laporan yang telah disusun belum difinalisasi dan belum didistribusikan kepada *stakeholders* terkait, (2) sebagian regulasi belum tuntas hingga ke tahap penetapan (3) jumlah pemirsa media penyiaran belum teridentifikasi, dan (4) adanya penolakan terhadap rencana regulasi.

Berdasarkan data pengukuran terhadap Direktorat Komunikasi Publik, sebanyak 4 atau 66,67% dari 6 Indikator Kinerja 2015 telah mencapai bobot 100%. Dua indikator lainnya atau 33,33% belum mencapai bobot 100%.

## 2. Kinerja Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi

Capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi secara umum sudah cukup baik ditandai dengan 2 target telah mencapai 100%. Satu target lainnya masih berupa draf sehingga tingkat pencapaiannya baru mencapai bobot 70%.

**Tabel 12. Capaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Bobot Capaian	Keterangan
Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Kerangka NKRI	Jumlah kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi	2 Kebijakan	- Pembuatan Draft/Outline Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Monitoring Isu Publik (MIP) - Draft Surat Edaran Menteri tentang Sistem Informasi dan Komunikasi Publik	70%	Tahapan 2d (bobot 70%)
	Jumlah analisis bidang polhukam, perekonomian	300 Analisis	- 293 Analisis MIP - 8 Analisis MCA	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)

	n, pembangunan manusia dan kebudayaan dan kemaritiman sebagai rekomendasi penyusunan kebijakan				
	Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (Daerah Terdepan, luar, tinggal, dan pas konflik)	24 Judul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan judul konten informasi berupa Buku dengan judul Hidup Cuma Sekali</li> <li>- Pembuatan judul konten informasi berupa Buku dengan judul Makna Pancasila</li> <li>- Pembuatan judul konten informasi berupa buku Kekerasan terhadap Anak (versi anak-anak)</li> <li>- Pembuatan judul konten informasi berupa buku Kekerasan terhadap Anak (versi dewasa)</li> <li>- Pembuatan Buku The Untold Stories versi KAA</li> <li>- Pembuatan Buku Harkitnas</li> <li>- Pembuatan Buku Bergerak dan Bertumbuh</li> <li>- Pembuatan Buku Infografis Edisi I</li> <li>- Pembuatan Buku Infografis Edisi II</li> <li>- Pembuatan Buku Infografis Edisi III</li> <li>- Pembuatan Buku Infografis Edisi IV</li> </ul>	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Buku Infografis Edisi V</li> <li>- Pembuatan Buku Infografis VI</li> <li>- Pembuatan Buku tentang Penyakit Kaki Gajah</li> <li>- Pembuatan Leaflet Sail Tomini</li> <li>- Pembuatan Buku tentang Pendidikan Kemaritiman bagi Anak</li> <li>- Pembuatan Buku tentang Pilkada</li> <li>- Pembuatan Buku Infografis VII</li> <li>- Pembuatan Buku Infografis VII</li> <li>- Pembuatan Buku Infografis IX</li> <li>- Pembuatan Buku Infografis X</li> <li>- Pembuatan Buku Saku Jaminan Kecelakaan Kerja</li> <li>- Pembuatan Buku SJSN Aman dan Terlindungi</li> <li>- Pembuatan Buku Jaminan Kematian Melindungi Keluarga Kami</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

Permasalahan utama pencapaian kinerja di lingkup Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi adalah adanya penyusunan regulasi yang belum tuntas hingga ke tahap penetapan. Hal itu perlu segera ditindaklanjuti di tahun berikutnya agar penyusunan regulasi dapat tuntas hingga ke tahap penetapan. Setiap penyusunan regulasi dapat dinilai 100% bila telah mencapai tahap penetapan.

Berdasarkan data pengukuran terhadap Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik, sebanyak 2 atau 66,67% dari 3 Indikator Kinerja 2015 telah mencapai bobot 100%. Satu atau 33,33% belum mencapai bobot 100%.

### 3. Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik

Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik secara umum sudah baik ditandai dengan semua target telah mencapai bobot 100%.

**Tabel 13. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Publik**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Uraian Target Realisasi	Bobot Capaian	Keterangan
Terlaksananya Peningkatan Peran Media Publik	Jumlah Media Publik (termasuk media center) yang diperkuat	180 Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek peningkatan kapasitas Pengelola Media bekerjasama dengan PWI (34 Media)</li> <li>- Bimtek pengelolaan Media Center wilayah Barat (Malang): 45 Media Center</li> <li>- Bimtek pengelolaan Media Center wilayah Tengah (Pontianak) 50 media center</li> <li>- Bimtek Pemanfaatan Media Sosial Untuk Pengelola Media Center Daerah Wilayah Timur (Bali): 50 Media Center</li> <li>- Pelaksanaan PSO bidang Pers Perum LKBN Antara (Apr-Jun, Juli-Sept, dan Okt - Des)</li> </ul>	100%	Tahapan 3c (bobot 100%)
	Jumlah Pembangunan dan penguatan Media Center lengkap dan berfungsi efektif di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah terluar/ Terdepan/Pasca Konflik.	35 Daerah	35 lokasi		100%

	<p>Jumlah Kendaraan Pusat Teknologi Informasi Komunitas (M-Pustaka) sebagai penyebaran informasi di daerah terluar, terdepan, tertinggal dan pasca konflik</p>	<p>10 Unit</p>	<p>Serah Terima Unit Kendaraan M-Pustaka (10 Unit)</p>	<p>100%</p>	<p>Tahapan 7e (bobot 100%)</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advertorial (7 advertorial) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Advertorial di Media Indonesia (Hari Pers Nasional) dan Jakpost &amp; Majalah Speak (Konferensi Asia Afrika)</li> <li>b. Advertorial di Tempo Group (KAA), Suara Pembaruan (KAA), Kompas+Warta Kota (Harkitnas)</li> <li>c. Advertorial Tips Mudik Lebaran Aman dan Nyaman di Sindo Weekly</li> <li>d. Advertorial Mudik Lebaran Aman dan Nyaman, ini Tipsnya di Koran Sindo</li> <li>e. Advertorial Nawacita Bahari Rayakan Kemerdekaan RI ke-70 di Koran &amp; Majalah Tempo</li> </ul> </li> </ul>		

			<p>f. Advertorial Sail Tomini di Media Indonesia</p> <p>g. Advertorial Setahun Pemerintahan Jokowi di Gatra</p>		
	<p>Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi (media cetak, elektronik, media sosial) bertemakan prioritas dan dimensi pembangunan Indonesia</p>	<p>18 Laporan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan Tabloid Komunika yang didistribusikan ke 1126 lokasi yang terdiri dari instansi pemerintah dan BUMN, lembaga pendidikan, perpustakaan, KIM, dan LSM edisi 1 s.d 21 (21 edisi)</li> <li>- Penerbitan Jurnal Dialog Kebijakan Publik 17 s.d 19 (3 edisi)</li> <li>- Penerbitan Majalah Friends of Indonesia: World's Most Complicated Local Elections Accomplished</li> <li>- Penerbitan Majalah Friends of Indonesia: Indonesia's 70 Years of Statehood The Ups dan Downs In The Nation's Life</li> <li>- Penerbitan Handbook of Indonesia: 70th Anniversary of Independence</li> </ul>	<p>100%*</p>	<p>Tahapan 4e (bobot 100%)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan website infopublik (Jan sd Mar, Apr sd Jun, Jul sd Sept, Okt sd Des)</li> </ul>			<p>Tahapan 4e (bobot 100%)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialog Interaktif di Kompas TV dan KBR Radio dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional</li> </ul>			<p>Tahapan 3b (bobot 75%)</p>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialog Interaktif TV dan Radio Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>- Dialog Interaktif Sosialisasi Carnaval Khatulistiwa</li> <li>- Dialog Interaktif Sail Tomini di Wideshot MetroTV.</li> <li>- Dialog Interaktif Anugerah Komunikasi Indonesia di Metro TV</li> <li>- Dialog Interaktif Paket Kebijakan Ekonomi di Metro TV</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskusi Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam rangka Konferensi Asia Afrika</li> <li>b. Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional di MMTC Yogyakarta</li> </ul> </li> </ul>	Tahapan 3b (bobot 75%)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baliho <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konferensi Asia Afrika</li> <li>b. Anti Narkoba</li> </ul> </li> </ul>	Tahapan 3b (bobot 75%)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebaran Informasi Publik melalui Media Pertunjukkan Rakyat "Konferensi Asia Afrika"</li> <li>- Pertunjukan Rakyat Diseminasi Informasi Revolusi Mental</li> <li>- Pertunjukan Rakyat dalam rangka Sail Tomini 2015 di parigi Moutong</li> <li>- Pameran Diseminasi Informasi Kebijakan Ditjen IKP dan Program pelayanan publik Lingkungan Kementerian Kominfo</li> </ul>	Tahapan 3b (bobot 75%)

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pameran Kongres Pranata Humas 2015</li> <li>- Pemutaran PSA BPJS Kesehatan</li> <li>- Pemutaran PSA Merscov</li> </ul>		
Terbangunnya proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap di 1200 kecamatan	Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 1.200 kecamatan	1 Dokumen	- Strategi Komunikasi Revolusi Mental	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)
	Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat untuk menciptakan awareness/berpartisipasi/menonton film terkait revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 1.200 kecamatan	1 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan Tabloid Komunika Edisi Khusus terkait kampanye Revolusi Mental (15.000 eksemplar)</li> <li>- Penerbitan Majalah Friends of Indonesia Edisi Khusus Revolusi Mental dengan tema "Revolutionizing the Mentality"</li> <li>- Diskusi Publik dan Nonton Film dengan tema "Pembangunan Karakter Bangsa", dihadiri 200 partisipan terdiri dari: mahasiswa, pegawai instansi pemerintah, dan masyarakat umum di UNDIP Semarang</li> </ul>	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi	1 Laporan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Komunikasi Kampanye Revolusi Mental di tiga lokasi:	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)

	kampanye revolusi mental		Jakarta, Semarang, dan Bengkulu		
--	--------------------------	--	---------------------------------	--	--

\*Dihitung 100% karena target 18 Laporan sudah tercapai

Berdasarkan data pengukuran terhadap Direktorat Pengelolaan Media Publik, sebanyak 7 atau 100% dari 7 Indikator Kinerja 2015 telah mencapai bobot. Tidak ada satupun target pencapaian indikator yang berada di bawah 100%.

#### 4. Kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi

Capaian kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi secara umum sudah cukup baik ditandai dengan hampir semua target telah mencapai 100%. Satu target lainnya hanya mencapai 68, 33% karena ada item indikator yang masih berupa draf dan belum dilakukan evaluasi.

**Tabel 14. Capaian Kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Bobot Capaian	Keterangan
Terselenggaranya Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk penyebaran/distribusi informasi publik	Jumlah pelayanan informasi publik melalui kemitraan dengan SKPD/OPD	30 SKPD/OPD	- Instrumen monev PIKP Bimtek Bakohumas dihadiri 139 peserta dari 71 SKPD/OPD dan 16 K/L a) Semarang, dihadiri 73 peserta dari 43 SKPD/OPD dan 9 K/L. b) Kota Mataram dihadiri 66 peserta terdiri dari 28 SKPD/OPD, 7 K/L, dan 2 PTN c) kota Denpasar dihadiri 68 peserta dari 43 SKPD/OPD dan 7 K/L	100%*	Tahapan 3c (bobot 100%)
			- Pelaksanaan Pelayanan Informasi melalui jaringan Bakohumas (K/L/D) melalui penyebaran Narasi Tunggal oleh 210		Tahapan 4e (bobot 100%)

			<p>Kab/Ko yang dimuat melalui web K/L/D</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseminasi Informasi melalui Warta Bakohumas dan Artikel di Web Bakohumas</li> <li>- Materi Diseminasi: Pemerintah siap menghadapi mudik lebaran 2015, Informasi Inpres No. 9 Tahun 2015, Pemerintah mendorong gerakan penggunaan rupiah untuk transaksi di NKRI, Revolusi Mental, Humas sebagai ujung tombak Gerakan Nasional Revolusi Mental, 70 Tahun Indonesia Merdeka, dll (terlampir).</li> <li>- Panduan Penyebaran Informasi Publik berupa Aplikasi Sindikasi Konten (GPR Widget System) dapat di unduh di <a href="http://kominfo.go.id/node/6297/petunjuk+teknis+pemasang+Widget+konten+GPR#.VjHaarcKM9">http://kominfo.go.id/node/6297/petunjuk+teknis+pemasang+Widget+konten+GPR#.VjHaarcKM9</a>.</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi telah dilakukan terhadap K/L/D yang telah menindaklanjuti materi/narasi tunggal yang di kirimkan.</li> </ul>		
	Jumlah kemitraan dalam rangka penguatan organisasi	12 Laporan	- Kerjasama diseminasi informasi dalam bentuk pelaksanaan forum cross cutting issue di Sambas	68,33%	- Tahapan 3c (bobot 100%)

	<p>masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama diseminasi informasi dalam bentuk pelaksanaan forum cross cutting issue dengan Muslimat NU di Jakarta Peserta 200 orang anggota Muslimat NU</li> <li>- Hasil monev komitmen diseminasi informasi oleh peserta Bimtek: 68% menyebarkan melalui media tatap muka, 23% melalui media internal (mading, buletin, dll), 21% melalui media online (email, web, blog), dan 37% melalui media sosial (Facebook, Twitter)</li> <li>- Laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama diseminasi informasi</li> <li>- Kerjasama diseminasi informasi dalam bentuk pelaksanaan forum cross cutting issue</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft Dokumen PKS dengan mitra strategis <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fatayat NU</li> <li>b. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah</li> <li>c. Korps HMI Wati</li> <li>d. Muslimat NU</li> <li>e. Persatuan Pendalangan Indonesia</li> <li>f. JRKI</li> <li>g. UGM</li> <li>h. UNTAN</li> </ul> </li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan dialog interaktif di LPP TVRI sebanyak 35 kali</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan 2b (bobot 30%)</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan 3b (bobot 75%)</li> <li>- Perhitungannya adalah</li> </ul>
--	---	--	---	--	--

				(100+30+75)/3
Jumlah peserta forum edukasi literasi media untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan/pasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai kebutuhannya	1000 Peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum Edukasi Literasi Media dalam rangka HPN di Batam (250 orang)</li> <li>- Forum Edukasi Literasi Media dengan UIN Sunan Gunung Jati di Yogyakarta yang dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari: mahasiswa, kelompok masyarakat, tokoh agama, humas provinsi, Alumni PAPP FISIPOL UGM.</li> <li>- Forum Edukasi Literasi Media dengan Fatayat NU di Jombang. Peserta 250 orang anggota Fatayat NU</li> <li>- Forum Edukasi Literasi Media dengan Universitas Tanjung Pura di Pontianak yang dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai unsur berbeda, yakni: mahasiswa, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.</li> <li>- Hasil monev komitmen diseminasi informasi oleh peserta Bimtek: 89% menyebarkan melalui media tatap muka, 41% melalui media internal (mading, buletin, dll), 47% melalui media online (email, web, blog), dan 54% melalui media sosial (Facebook, Twitter)</li> </ul>	100%*	- Tahapan 3c (bobot 100%)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publikasi isu strategis di media nasional (HPN)</li> <li>- Penayangan advertorial mengenai isu strategis (HPN, HARKITNAS, 3M, 17 Agustus, dsb) serta dukungan terhadap aktivitas diseminasi (Forum dan Bimtek)</li> <li>- Publikasi isu strategis di media nasional (KIS, 3M)</li> <li>- Penayangan advertorial mengenai isu strategis berupa dukungan terhadap aktivitas diseminasi (Forum dan Bimtek)</li> <li>- Publikasi isu strategis di media nasional (Subsidi BBM dan Revolusi Mental)</li> </ul>		Tahapan 4e (bobot 100%)
Jumlah Pemberdayaan Media Komunitas (terutama daerah perbatasan/te rluar, terpicil dan pasca konflik) sebagai penyebar informasi publik kepada masyarakat	5 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Media Komunitas di Kabupaten Aceh Besar</li> <li>- Forum Media Komunitas di Lamongan dalam rangka meningkatkan peran media komunitas dan lokal untuk menyajikan informasi terkait perikanan.</li> <li>- Bimtek Media Komunitas di Kabupaten Sleman yang dihadiri oleh 60 peserta terdiri dari pengelola media (radio komunitas, media online, radio swasta lokal) di Kabupaten Sleman dan Provinsi Yogyakarta, mahasiswa, tokoh</li> </ul>	100%	Tahapan 3c (bobot 100%)

		<p>agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan pemda setempat.</p> <p>- Bimtek Media Komunitas di Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri 60 peserta dari para pengelola media (radio komunitas, media online, radio swasta lokal) di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan pemda setempat.</p> <p>- Bimtek Media Komunitas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh 60 peserta terdiri dari pengelola media (radio komunitas, media online, radio swasta lokal)</p>		
Jumlah lokasi Pemberdayaan Forum Komunikasi Media Tradisional dalam upaya meningkatkan kualitas media tradisional dalam penyebaran informasi publik, mempertahankan	5 Provinsi	- Pagelaran Media Pertunjukkan Rakyat di Lampung (Peserta 500 orang penonton, Hasil monev komitmen diseminasi informasi oleh peserta Bimtek: 74% menyebarkan melalui media tatap muka, 16% melalui media internal (mading, buletin, dll), 6% melalui media online (email, web, blog), dan 16% melalui media sosial (Facebook, Twitter)	100%	Tahapan 3c (bobot 100%)

	<p>kan nilai-nilai budaya dan merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa</p>		<p>- Pagelaran Media Pertunjukkan Rakyat di Jombang (Peserta 1000 orang penonton, Hasil monev komitmen diseminasi informasi oleh peserta Bimtek: 21% menyebarkan melalui media tatap muka, 1% melalui media internal (mading, buletin, dll), 1% melalui media online (email, web, blog), dan 2% melalui media sosial (Facebook, Twitter)</p>		
			<p>- Pemberdayaan FK Metra di Provinsi Sumatera Barat  - Pemberdayaan FK Metra di Provinsi Kalimantan Barat  - Pemberdayaan FK Metra di Provinsi Nusa Tenggara Timur  - Pagelaran Media Pertunjukkan Rakyat di Kabupaten Cepu dengan peserta 1000 orang penonton  - Sarasehan Media Pertunjukkan Rakyat di Kota Surabaya, Jawa Timur yang dihadiri oleh Unsur KIM, Humas Pemda dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia selaku Instansi pembina FK Metra di daerah</p>		<p>Tahapan 3c (bobot 100%)</p>
	<p>Jumlah pemberdayaan Kelompok informasi masyarakat (terutama</p>	<p>10 Kab/Kota</p>	<p>- Bimtek KIM di Kab. Kapuas Hulu (Peserta 60 orang anggota KIM dari Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu.</p>	<p>100%</p>	<p>Tahapan 3c (bobot 100%)</p>

	<p>daerah perbatasan/te rluar, terpencil dan pasca konflik)</p>		<p>Hasil monev: komitmen diseminasi informasi oleh peserta Bimtek: 93% menyebarkan melalui media tatap muka, 53% melalui media internal (mading, buletin, dll), 59% melalui media online (email, web, blog), dan 68% melalui media sosial (Facebook, Twitter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek KIM di Kota Sabang (Peserta 70 orang anggota KIM Kota Sabang. Hasil monev: komitmen diseminasi informasi oleh peserta Bimtek: 66% menyebarkan melalui media tatap muka, 50% melalui media internal (mading, buletin, dll), 47% melalui media online (email, web, blog), dan 57% melalui media sosial (Facebook, Twitter</li> <li>- Bimtek KIM di Kota Padang (Peserta 60 orang anggota KIM dari Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, dan Kab. Pasaman. Hasil monev: komitmen diseminasi informasi oleh peserta Bimtek: 100% menyebarkan melalui media tatap muka, 61% melalui media internal, 77% melalui media online, dan 95% melalui media sosial</li> </ul>		
--	---	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek KIM di Solok</li> <li>- Bimtek KIM di Aceh Besar</li> <li>- Bimtek KIM di Kota Bogor</li> <li>- Bimtek KIM di Jayapura</li> <li>- Bimtek KIM di NTT</li> <li>- Bimtek KIM di Merauke</li> <li>- Sarasehan Kelompok Informasi Masyarakat di Kota Surabaya yang dihadiri oleh Unsur KIM, Humas Pemda dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia selaku Instansi pembina KIM di daerah</li> </ul>		Tahapan 3c (bobot 100%)
--	--	---	--	-------------------------

Permasalahan utama pencapaian kinerja di lingkup Direktorat Kemitraan Komunikasi adalah (1) masih adanya MoU yang belum tuntas hingga tahap penetapan, dan (2) masih adanya kegiatan sosialisasi yang belum dievaluasi hingga tahun anggaran 2015 selesai. Oleh karena itu, seluruh rancangan regulasi kedepannya perlu dituntaskan dan kegiatan sosialisasi perlu dievaluasi.

Berdasarkan data terhadap pengukuran Direktorat Kemitraan Komunikasi, sebanyak 5 atau 83,33% dari 6 Indikator Kinerja 2015 telah mencapai bobot 100%. Satu indikator lainnya atau 16,67% belum mencapai bobot 100%.

#### 5. Kinerja Direktorat Layanan Informasi Internasional

Capaian kinerja Direktorat Layanan Informasi Internasional secara umum sudah cukup baik ditandai dengan hampir semua target telah mencapai 100%. Satu target lainnya hanya mencapai bobot 50% karena jumlah targetnya tidak tercapai.

**Tabel 15. Capaian Kinerja Direktorat Layanan Informasi Internasional**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Bobot Capaian	Keterangan
Terselenggaranya kemitraan dengan lembaga dan institusi internasional	Jumlah masyarakat Indonesia dan masyarakat asing	800 Orang	- Kegiatan Indonesia Update 2015 di Amerika Serikat diselenggarakan di 3 kota (Washington DC, New York dan	100%	Tahapan 3c (bobot 100%)

dalam rangka pencitraan positif negara Indonesia di Dunia Internasional	penerima informasi di LN serta masyarakat asing di dalam negeri		<p>Missouri) pada tanggal 26 April-3 Mei 2015 dengan total jumlah audience 500-an orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Indonesia Update 2015 di Belanda diselenggarakan di 3 kota (Den haag, Utrecht, dan Leiden) pada tanggal 26 Mei-2 Juni 2015 dengan total jumlah audience 450 orang.</li> <li>- Partisipasi dalam Tong Tong Fair di Den Haag Belanda tanggal 27 Mei -7 Juni 2015</li> <li>- Partisipasi dalam pameran KL Convergence di Malaysia 27-29 Agustus 2015</li> </ul>		
	Jumlah kemitraan dan layanan informasi internasional dengan perwakilan negara asing dan lembaga internasional	5 Kemitraan dan Judul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youth" (Jenesys) akhir Januari dan 23 Februari – 3 Maret 2015 dalam bentuk kunjungan mahasiswa Indonesia dan pegawai kominfo ke Jepang.</li> <li>- Kunjungan Pegawai Kominfo dan KIM ke Malaysia tanggal 26 – 30 Maret 2015</li> <li>- Working group on digital, content and promotion ASEAN dalam kerangka kerjasama negara-negara ASEAN</li> <li>- Fiesta Muzik 2015 sebagai perwujudan kerjasama dengan</li> </ul>	100%	Tahapan 3c (bobot 100%)

		TVRI, Media Corp, dan Kementerian Komunikasi Singapore - Kerjasama dalam program extended summer studies mahasiswa amerika serikat di bandung dengan United States Indonesia Society (USINDO)		
Jumlah kemitraan dengan media asing	10 Kemitraan	- Melakukan peninjauan dan pertemuan informal dengan KOMU TV (satu-satunya stasiun tv nasional yang dikelola Missouri School of Journalism, Amerika Serikat) - Peninjauan kerjasama dengan Voice of America (VOA) diawali dengan melakukan kunjungan dan diskusi di kantor VOA Washington DC - Kerjasama publikasi kegiatan sail to mini 2015 melalui kunjungan jurnalistik dengan a. Rappler b. Shangbao c. Bernama	50%	Tahapan 3c (bobot 100%). Karena hanya 5 atau 50% dari yang seharusnya 10 kemitraan, maka bobotnya sebesar 0,5x100%
Jumlah Publikasi konten di media asing/berbasa asing tentang citra positif Indonesia	5 Judul	- Publikasi informasi tentang KAA 2015 dengan tema Asian-African 2015: Power of the People di majalah Tempo English (13-19 April 2015) - Publikasi informasi dengan tema Indonesia & China Further Strengthen Mutual Partnership Prior to the 65 Years of Diplomatic	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Relationship di koran Jakarta Globe (17 April 2015)</li> <li>- Publikasi informasi dengan tema Showcasing Indonesia's Development Plan to Global Industry Players and Decision Makers di koran Jakarta Globe (20 April 2015)</li> <li>- Publikasi informasi dengan tema "Towards Indonesia's Information Society" di The Report Oxford</li> <li>- Publikasi Sail Tomini 2015 dengan tema ""Sail Tomoni, Takes Tomini Bay's Beauty to The World"di Majalah Asia Globe</li> </ul>		
Tersedianya Kebijakan Layanan informasi internasional dalam rangka pencitraan positif Indonesia	Jumlah perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan informasi internasional.	1 Dokumen	1 Dokumen NSPK Layanan Informasi Internasional di SKPD Daerah	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)

Permasalahan utama pencapaian kinerja di lingkup Direktorat Layanan Informasi Internasional adalah adanya target jumlah kemitraan yang tidak tercapai. Oleh karena itu, penetapan target kedepannya perlu diperhitungkan dengan akurat agar dapat direalisasikan seluruhnya.

Berdasarkan data pengukuran terhadap Direktorat Layanan Informasi Internasional, sebanyak 4 atau 80% dari 5 Indikator Kinerja 2015 telah mencapai bobot 100%. Satu atau 20% indikator belum mencapai bobot 100%.

## 6. Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal IKP

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal IKP secara umum sudah cukup baik ditandai dengan hampir semua target telah mencapai bobot 100%. Ada satu target hanya mencapai nilai 80% karena hanya tersusun 4 dokomumen dari target 5 dokumen yang direncanakan.

**Tabel 16. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal IKP**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Bobot Capaian	Keterangan
Tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Tersusunnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	1 Dokumen Penyempurnaan Draft RUU	1 Dokumen Naskah Akademik final disertai draf RUU PDP pengajuan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk prolegnas 2016/2017	100%	Tahapan 1g (bobot 100%)
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Jelas dan Terukur	4 Dokumen	- Dokumen PK 2015 - Dokumen Renja 2015 - RKAKL 2016 - Dokumen Program Prioritas 2016	100%	Tahapan 5e (bobot 100%)
	Jumlah Dokumen Pendukung Penerapan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	- Dokumen Analisis Jabatan - Dokumen Standar Kompetensi Jabatan - Dokumen Assesment Kompetensi Jabatan - Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)
	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan	6 Dokumen	- 1 Dokumen laporan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kominfo - 1 Dokumen laporan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Informasi & Komunikasi Publik - 1 Dokumen Laporan Konsultasi Publik RUU PDP	100 %	Tahapan 4e (bobot 100%)

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Dokumen Penyusunan Produk Hukum Keputusan Menteri</li> <li>- 1 Dokumen Penyusunan Produk Hukum Keputusan Dirjen</li> <li>- Forum Diskusi Membangun Etika Pers di Era Keterbukaan Informasi</li> </ul>		
	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAI dan peraturan perundang-undangan lainnya	3 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Laporan Pelaksanaan Bimtek Teknis Keuangan di Solo</li> <li>- Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan 2015</li> <li>- Dokumen Laporan Keuangan 2015</li> </ul>	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)
	Jumlah Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan Laporan Kinerja	5 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen LAKIP 2014</li> <li>- Dokumen LAPTAH 2014</li> <li>- Dokumen Lap Semester 1</li> <li>- Dokumen Instrumen Monev (pelaksanaan GPR)</li> <li>- Dokumen Draft Laporan Kinerja 2015</li> </ul>	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)
	Jumlah tata kelola pelayanan informasi dan komunikasi publik	5 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Laporan BMN Semester I</li> <li>- Dokumen Monitoring dan Cek Fisik Hibah Media Center dan Mobil Unit</li> <li>- Dok Laporan BMN Semester II</li> <li>- Dok Laporan Penghapusan dan Penyelesaian BMN</li> </ul>	80%	Tahapan 4e (bobot 100%)
	Jumlah ketersediaan	12 Bulan Layanan	- 6 Bulan Layanan Perkantoran (ATK,	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)

	layanan dan sarana perkantoran sesuai kebutuhan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gaji Pegawai, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pembinaan Pegawai, Peralatan Perkantoran)</li> <li>- 6 Bulan Layanan Perkantoran (ATK, Gaji Pegawai, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pembinaan Pegawai, Peralatan Perkantoran)</li> </ul>		
	Jumlah Pelayanan informasi peringatan 60 tahun KTT Asia Afrika	1 Kali	Dokumen laporan pelaksanaan pelayanan informasi peringatan 60 tahun KTT Asia Afrika	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)
	Jumlah Dokumen Kerjasama	3 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Dokumen rancangan MoU internasional</li> <li>- 1 Dokumen Laporan FGD Model Diseminasi Informasi di Perbatasan (Kerjasama RRI)</li> <li>- Dokumen Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Kewajiban Publik/PSO Antara</li> <li>- 1 Dokumen Draf Model Penyiaran di Perbatasan (Kerjasama KPI)</li> <li>- 1 Draf Dokumen MoU Kominfo dengan BPJS Ketenaga-kerjaan</li> <li>- Fasilitas kerjasama dengan media dalam rangka pelaksanaan KTT Asia Afrika</li> </ul>	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)
	Persentase SDM Ditjen IKP yang taat peraturan kepegawaian	80%	89,44% SDM Ditjen IKP taat peraturan kepegawaian	100%	Tahapan 4e (bobot 100%)

Permasalahan utama pencapaian kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal IKP adalah adanya tidak tercapai seluruhnya. Oleh karena itu, penetapan target kedepannya perlu diperhitungkan dengan akurat agar dapat direalisasikan seluruhnya.

Berdasarkan data pengukuran terhadap Sekretariat Ditjen IKP, sebanyak 10 atau 90, 91% dari 11 Indikator Kinerja 2015 telah mencapai bobot 100%. Satu indikator atau 9, 09% belum mencapai bobot 100%.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hasil pencapaian lingkup Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkup Eselon II Ditjen IKP sebagian besar telah memenuhi bobot 100%. Namun, pencapaian di lingkup Eselon II tersebut ternyata belum cukup mendukung (kurang berkorelasi) secara memuaskan terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon I Ditjen IKP. Kondisi itu menandakan bahwa permasalahan yang perlu mendapat perhatian utama dalam Program Kerja Ditjen IKP berikutnya adalah adanya data IKK Eselon II yang kurang fokus mendukung IKU Eselon I Ditjen IKP.

**Diagram 5. Korelasi Pengukuran Capaian IKU dan IKK di Lingkup Ditjen IKP**

Satuan Kerja	Realisasi Yang Mencapai Bobot 100%
Direktorat Komunikasi Publik	66,67%
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi	66,67%
Direktorat Pengelolaan Media Publik	100%
Direktorat Kemitraan Komunikasi	83,33%
Direktorat Layanan Informasi Internasional	80%
Sekretariat Ditjen IKP	90,91%

Perjanjian Kinerja Ditjen IKP	Realisasi Yang Mencapai Bobot 100%
Perjanjian Kinerja Ditjen IKP berdasarkan RPJMN 2015-2019	14, 29%
Perjanjian Kinerja Ditjen IKP yang mendukung seluruh fokus pembangunan Pemerintah Indonesia	0%

Penyebab Capaian Kinerja (IKU) Ditjen IKP tahun 2015 secara umum belum mencapai bobot 100% karena beberapa hal yakni (1) target dan realisasi belum selaras, (2) target yang ingin dicapai belum disepakati, (3) pengukuran tidak mewakili masyarakat yang dituju, (4) tidak dilakukan evaluasi, (5) adanya perbedaan pandangan atau pemahaman antara Ditjen IKP dengan *stakeholders* terkait terhadap beberapa indikator, dan (6) adanya penolakan dari *stakeholders* terkait.

## **B. Saran**

1. Ditjen IKP perlu meninjau kembali (review) agar IKU dan IKK dapat lebih berkaitan (berkorelasi erat) sehingga capaian Program Ditjen IKP Tahun 2016 dapat mencapai target yang ditetapkan. Peninjauan kembali dilakukan terhadap Indikator Kinerja yang merujuk kepada RPJMN 2015-2019 maupun Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Direktif Menkominfo
2. Upaya peninjauan kembali tersebut perlu dibahas secara bersama-sama oleh Kemenkominfo, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan berbagai stakeholders terkait lain. Hal itu karena perbaikan IKU dan IKK akan mengubah Rencana Strategis Ditjen IKP yang tercantum dalam lampiran RPJMN 2015-2019.
3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perbaikan IKU dan IKK adalah seluruh IKU dan IKK dipastikan telah selaras dan setiap indikator tersebut dipastikan dapat diukur.

## Referensi

- Kementerian Kominfo. Peraturan Menkominfo Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Menkominfo Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementean Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- “Corruption Perceptions Index 2014”*.<https://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014>
- Indo Barometer, (2015, Oktober 9) *Keberhasilan dan Kegagalan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK Data Survei Nasional 14-22 September 2012* dalam <http://indobarometer.com/publish/?p=survei>

## Lampiran Laporan Realisasi Keuangan 2015

NO	Unit Kerja	Pagu DIPA	Realisasi s.d Desember 2015	%	Sisa Dana	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik</b>					
1	Direktorat Komunikasi Publik	10,793,473,000	9,729,664,758	90.14	1,063,808,242	9.86
2	Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi	16,013,490,000	15,894,610,935	99.26	118,879,065	0.74
3	Direktorat Pengelolaan Media Publik	30,299,000,000	30,129,929,218	99.44	169,070,782	0.56
4	Direktorat Kemitraan Komunikasi	15,798,030,000	15,720,719,363	99.51	77,310,637	0.49
5	Direktorat Layanan Informasi Internasional	12,840,319,000	12,575,363,361	97.94	264,955,639	2.06
6	Sekretariat Direktorat Jenderal IKP	83,444,086,000	76,244,636,152	91.37	7,199,449,848	8.63
	<b>Jumlah Total:</b>	<b>169,188,398,000</b>	<b>160,294,923,787</b>	<b>94.37</b>	<b>8,893,474,213</b>	<b>5.63</b>



**PROFESIONAL**  
**AKUNTABEL**  
**INTEGRITAS**  
**INOVATIF**

*Mari melayani dengan* **PROAKTIF**

